

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN (BEBERAPA KAJIAN KEBIJAKAN)

Jacob Makapedua¹; Christien Karambuti¹; Cysca Langi¹

¹Staff Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado, Indonesia
Koresponden email: jacob.makapedua@gmail.com

Abstract

The purpose of this social economic study is to provide some understanding of the problems faced by the Indonesian nation in its efforts to achieve the goals of prosperity and welfare for all its people. There are several different views of economists and business practitioners in addressing the problems faced by the Indonesian people in achieving this lofty goal, such as poverty alleviation and unequal income distribution.

Ideally, income distribution is a way in which national wealth/income is distributed among various factors of production that contribute to equal distribution of income for the people and can contribute to improving people's welfare. Income distribution is a very important issue for a country and should be the main focus of the government in ensuring the fulfillment of the needs of its people. Industrialization and increasing state investment are indeed important in economic development, but the way in which state income is distributed fairly is also important.

Several policies deemed necessary to be followed up on problems of inequality in income distribution and poverty include the use of labor intensive rather than capital intensive production methods in several production sectors. Increasing state investment in the field of human resources to increase human resource competency capabilities which will later increase the nation's competitiveness, focus on development of the small and medium business sector which can drive the people's economy and implement progressive tax policies, especially for people with high incomes.

Keywords: income distribution, poverty, economic development policies

Abstrak

Tujuan kajian ekonomi kemasyarakatan ini untuk memberikan beberapa pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upayanya pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terdapat beberapa perbedaan pandangan para ekonom dan praktisi bisnis dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan luhur ini seperti pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Idealnya distribusi pendapatan adalah suatu cara dimana kekayaan/pendapatan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap pemerataan pendapatan bagi rakyatnya serta dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat penting, bagi suatu negara dan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Industrialisasi dan peningkatan investasi negara memang penting dalam pembangunan ekonomi tetapi cara pendistribusian pendapatan negara secara adil juga adalah penting.

Beberapa kebijakan yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti terhadap permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan antara lain penggunaan metode produksi yang berbasis pada labour intensive daripada capital intensive pada beberapa sektor produksi. Peningkatan investasi negara pada bidang human resources untuk meningkatkan kemampuan kompetensi sumberdaya manusia yang nantinya akan meningkatkan daya saing bangsa, fokus pengembangan pada sektor usaha kecil dan menengah yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat serta menerapkan kebijakan pajak yang progresif terutama untuk masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Kata kunci: distribusi pendapatan, kemiskinan, kebijakan pembangunan ekonomi kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan bangsa kita adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Kemakmuran suatu masyarakat tentunya dapat diukur dari standar hidup (*standard of living*) dan tingkat pendapatan (*income*) masyarakat pada umumnya. Kesimbangan dan distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat adalah merupakan salah satu prasyarat sehingga suatu masyarakat dapat dikatakan "*makmur*".

Sasaran dari keseimbangan pendapatan ini menyangkut bagaimana pendapatan, pelayanan publik dan konsep kesejahteraan secara umum didistribusikan secara adil dan merata. Banyak kalangan yang mengukur bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan GDP adalah merupakan indikator utama terjadinya peningkatan

kesejahteraan dalam masyarakat. Sementara disatu sisi sebagian ekonom seakan-akan mengamini pendapat tersebut.

Orientasi konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekan pada memaksimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) daripada pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (income disparities) dalam masyarakat sudah selayaknya ditinjau kembali. Hal ini perlu dicermati oleh kita bersama bahwa konsep pembangunan ekonomi kemasyarakatan seharusnya diimplementasikan dalam perencanaan, strategi, kebijakan dan program kerja pembangunan ekonomi yang lebih memfokuskan pada menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam upaya untuk memberantas kemiskinan. Pola pendekatan pemikiran yang mengfokuskan pada orientasi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mengalirnya Foreign Direct Investment (FDI) sudah seharusnya dapat memberikan dampak/kontribusi yang lebih besar kepada rakyat miskin (*low income society*).

Sudah selayaknya kita meninggalkan hal-hal menyangkut *political and institutional interests* serta *struktur kekuasaan* yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan reorientasi strategi pembangunan terutama terhadap kepentingan masyarakat miskin. Kemiskinan (*poverty*) dan ketidakseimbangan pemerataan pendapatan (*inequality income distribution*) bukan saja hanya permasalahan pemerintahan, akan tetapi juga permasalahan kita bersama.

Kajian yang cermat dan objective menyangkut konsep pemberantasan kemiskinan serta tarik menarik pendapat menyangkut determinasi teoritis tentang kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan dan bagaimana pola/strategi pemecahannya baik dari para pakar, para perencana (*planner*) dan pengambil keputusan (*decision maker*) haruslah dihilangkan. Sebenarnya bila kita mau mengacuh pada evolusi dan konsep ilmu ekonomi, banyak hal bisa kita pakai sebagai respons kita terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi termasuk di dalamnya pemberantasan kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan, seperti *Malthusian theory of population*, *Marx theory of the increasing misery of the masses*, Teori Keynesian "*income and employment determination*" dan teori Harrod-Domar "*economic of Growth*, (Todaro., pp.73) yang merupakan respons langsung terhadap permasalahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang dihadapi saat ini.

Selayaknya dalam permasalahan pemberantasan kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan tidak seharusnya mengabaikan pertumbuhan ekonomi. karena pertumbuhan tetap dibutuhkan dan penting dalam usaha pemberantasan kemiskinan. Jadi permasalahan yang dihadapi ini bukan pada pemilihan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat atau keseimbangan pendapatan. Akan tetapi lebih berhubungan dengan model pertumbuhan ekonomi yang dapat memberi manfaat yang merata bagi seluruh rakyat, tidak seperti selama ini manfaatnya hanya dirasakan oleh sekelompok elite masyarakat saja. Singkatnya, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibutuhkan saat ini tidak hanya berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga berhubungan secara langsung dengan peningkatan standar hidup (*standards of living*) sebagian besar penduduk.

Pertumbuhan Ekonomi versus Keseimbangan Pendapatan

Adanya sebagian ekonom dan pengambil keputusan pembangunan percaya bahwa ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Argumen dasar yang dipergunakan

untuk mendukung pendapat ini adalah bahwa dengan tingginya pendapatan 20% masyarakat atas (*upper quintile*) maupun perusahaan akan menyisakan sebagian *income* tersebut untuk disimpan (*saving*) yang pada akhirnya akan di investasikan kembali dalam suatu mekanisme pertumbuhan ekonomi (Model Harrod-Domar).

Dengan kata lain, orang kaya akan menyimpan (*save*) dan menginvestasikan (*invest*) sebagian dari *income* mereka, sementara orang miskin membelanjakan habis pendapatan mereka untuk konsumsi pokok mereka tidak ada bagian dari *incomenya* yang akan disimpan. Dengan demikian menurut mereka, ketidak seimbangan pendapatan dalam masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak *saving* yang kemudian akan di investasi dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Lebih jauh lagi mereka berpendapat bahwa dengan tingginya GDP dan pendapatan percapita akan menghasilkan redistribusi pendapatan melalui pajak dan program subsidi. Tapi kenyataannya sampai saat ini model redistribusi yang demikian tidaklah dapat dicapai. Terdapat beberapa argumentasi yang dapat diuraikan untuk menjawab mengapa pemikiran tersebut tidaklah tepat:

1. Orang kaya (pemilik modal, tuan tanah dan para elit) tidaklah berkeinginan untuk menginvestasikan kembali sebagian dari proporsi pendapatan mereka pada perekonomian lokal. Mereka cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka yang pada kenyataannya didapat dari hasil kerja keras dari 40% (*the two bottom quintiles*) dalam masyarakat, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti pembelian barang-barang *lux (luxury goods)*, rumah mewah, perjalanan ke luar negeri, pembelian emas dan permata, dan menyimpan uang di bank luar negeri. Kenyataan ini dapatlah dikatakan bahwa strategi pertumbuhan yang tinggi dengan didasarkan pada ketidakseimbangan pendapatan (*inequalities*) pada kenyataannya tidaklah lebih dari suatu khayalan oportunis (*opportunistic myth*) yang didesain untuk kepentingan pribadi dan mempertahankan status quo ekonomi dan politik para elite.
2. Rendahnya pendapatan dan standar hidup masyarakat miskin menyebabkan kondisi kesehatan mereka yang kurang baik, nutrisi yang tidak cukup dan ketidak mampuan mendapatkan pendidikan yang memadai akan memberi dampak yang buruk bagi produktivitas kerja mereka yang pada akhirnya tidak akan memberikan sumbangannya yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Melalui strategi peningkatkan pendapatan 40% *quintiles* (masyarakat bawah) akan memberikan kontribusi bukan saja pada taraf hidup mereka tapi pada produktivitas dan pendapatan suatu perekonomian secara keseluruhan.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin akan mengstimulasi peningkatan permintaan akan produk-produk lokal. Peningkatan Permintaan akan produk lokal tersebut akan memberi sumbangan positif pada peningkatan produksi lokal, penggunaan tenaga kerja lokal dan investasi lokal. Kondisi ini akan menciptakan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat.
4. Pemberatasan kemiskinan melalui kesimbangan distribusi pendapatan masyarakat akan menghasilkan suatu perekonomian rakyat yang sehat dan mendorong partisipasi masyarakat secara luas dan proses pembangunan secara menyeluruh,serta kestabilan sosial politik.

Beberapa Kajian

Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menekan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pendapatan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang rasional dapatlah dilakukan melalui beberapa kebijaksanaan ekonomi yang komprehensif untuk mengurangi kesenjangan (gap) antara income 20% elite (upper quintile) dan 40% masyarakat bawah (*the bottom quintiles*).

1. Penggunaan metode "*labour-intensive*" dalam berproduksi. Kebijakan ini dipergunakan untuk mengganti "*capital-intensive*" selama ini dinikmati oleh para pemilik modal, seiring dengan kebijakan "*capital subsidies*" yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong tingginya produksi. Kebijaksanaan ini dilakukan dengan memberi subsidi pada barang modal melalui pemberian intensif, tariff yang rendah untuk barang-barang modal dari luar negeri (*capital goods import*) menyebabkan harga *capital goods* cenderung murah, sehingga banyak perusahaan cenderung menggunakan *capital intensive* dalam melakukan produksi. Kenyataannya, metode *capital intensive* ini telah memberikan kontribusi pendapatan yang besar hanya bagi para pemilik modal serta kehilangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja kasar (*unskilled and semi-skilled workers*). Efek dari pencabutan kemudahan-kemudahan ini akan mendorong harga barang-barang modal akan kembali ke harga yang sebenarnya (*the right price*), sehingga para pengusaha cenderung akan menggunakan *labour intensive* dalam berproduksi, karena selain harganya jadi lebih murah serta tersedianya tenaga kerja yang besar dalam masyarakat.
2. Investasi di Bidang *Human Resources*. Keseriusan dalam usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui perluasan untuk mendapatkan kesempatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin.
3. Pemberian kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan untuk masyarakat miskin dalam usaha-usaha produktifnya tanpa mendapat hambatan yang bersifat administratif dan cenderung diskriminatif. Kebijaksanaan ini akan lebih efektif apabila diikuti pula dengan kebijaksanaan menyangkut pengurangan kontrol *assets* dari 20% upper quintile terhadap 60% (*the three bottom quintiles*) serta dalam hal pemanfaatan fasilitas-fasilitas lainnya.
4. Pengurangan proporsi distribusi pendapatan masyarakat kaya (*upper quintile*) melalui pajak yang progresif dari pendapatan dan kekayaan mereka. Karena sudah selayaknya orang kaya membayar pajak yang lebih besar dari orang miskin. Karena selama ini, orang miskin membayar langsung pajaknya melalui pajak pendapatan dan pajak tidak langsung pada bahan kebutuhan pokok yang dibelinya. Sedangkan orang kaya memperoleh jauh lebih besar pendapatannya melalui *asset-asset* finansial maupun fisik yang sulit dilacak dan tidak dilaporkan. Malahan mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayar.
5. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. melalui pendapatan pajak, pemerintah dapat menyalurkan kembali ke pada masyarakat miskin baik secara langsung melalui subsidi pada bidang pendidikan, kesehatan dan nutrisi ataupun secara tidak langsung melalui penyediaan fasilitas publik, penciptaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan nyata (*real income*) masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pemerataan pendapatan masyarakat merupakan suatu kombinasi yang serasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang didambakan oleh sebagian besar komunitas bangsa ini. Beberapa pilihan kebijaksanaan yang diajukan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian bagi perencana dan pengambil keputusan dalam penetapan dan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan ini sudah selayaknya dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan dalam masyarakat yang pada akhirnya membawa masyarakat miskin keluar dari permasalahan yang selama ini melilit kehidupan mereka. Tentunya kesuksesan program ini harus didukung oleh "goodwill" pemerintah untuk benar-benar menjalankan program pemberantasan kemiskinan ini sebagai salah satu upaya strategis jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, G. 2003. *Teori Makro Ekonomi* (edisi ke-5), terjemahan Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga.
- Manurung, P.R.M. 2008. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Musfidar, M. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan".
- Setianegara, R.G. 2008. Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi, dan Kemiskinan. *Jurnal ORBITH 4*: 88-95.
- Sukirno, S. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.
- Todaro, M.P dan Simth, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.